



## **LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI BALI**



**PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020 - 2021  
13 - 17 FEBRUARI 2021**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Hukum**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), yang telah dilakukan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, dalam melaksanakan tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), DPR RI dapat mengadakan kunjungan kerja sesuai bidangnya.

Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, BUMN, dan Investasi melakukan kunjungan kerja ke daerah guna mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pada Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021, Komisi VI DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 17 Februari 2021.

**B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja**

Secara umum kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang berhubungan dengan perkembangan kinerja Pemerintah Daerah, kinerja beberapa BUMN serta perkembangan sektor industri tertentu termasuk permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya.

Secara khusus, kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Provinsi Bali mengingat kondisi pandemi menyebabkan tekanan yang sangat berat pada perekonomian di Provinsi Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata dan perhotelan termasuk strategi penyelesaiannya khususnya sebagai bagian dari pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Beberapa ruang lingkup pembahasan dalam kunjungan kerja reses di Provinsi Bali ini antara lain:

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata dan perhotelan di Provinsi Bali termasuk strategi penanganannya.
2. Strategi pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali termasuk keterjangkauan dan stabilitas harga pada masa Pandemi Covid-19.
3. Program perlindungan konsumen di Provinsi Bali.
4. Perkembangan aktivitas Bandara International Ngurah Rai dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Bali pada masa Pandemi Covid-19.

5. Dukungan perbankan terhadap pelaku pariwisata dan perhotelan di Provinsi Bali khususnya untuk segmen *small and medium enterprises*.
6. Realisasi penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Bank BUMN di Pulau Bali.
7. Kebutuhan energi (BBM dan Gas) di Provinsi Bali serta strategi pemenuhannya di masa Pandemi Covid-19.

**C. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI**

<b>NO. ANGG.</b>	<b>N A M A</b>	<b>KETERANGAN</b>
A-33	FAISOL RIZA, SS	KETUA / F.PKB
A-189	ARIA BIMA	PIMP/ F.PDIP
A-327	GDE SUMARJAYA LINGGIH, SE., MAP	PIMP / F.P.GOLKAR
A-103	MOHAMAD HEKAL, MBA	PIMP/ F.P.GERINDRA
A-352	MARTIN MANURUNG, SE., MA	PIMP / F.NASDEM
A-161	DARMADI DURIANTO	F.PDIP
A-170	RIEKE DIAH PITALOKA	F.PDIP
A-251	Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, MA	F.PDIP
A-158	SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON	F.PDIP
A-181	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc	F.PDIP
A-334	Drs. MUKHTARUDIN	F.P.GOLKAR
A-268	LAMHOT SINAGA	F.P.GOLKAR
A-311	DONI AKBAR, SE	F.P.GOLKAR
A-348	TRIFENA M. TINAL, B.Sc	F.P.GOLKAR
A-65	ANDRE ROSIADE	F.P.GERINDRA
A-135	HENDRIK LEWERISSA, SH., LLM	F.P.GERINDRA
A-131	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG	F.P.GERINDRA
A-94	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., MM., MBA	F.P.GERINDRA
A-128	Dr. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH	F.P.GERINDRA
A-396	MUHAMMAD RAPSEL ALI	F.P.NASDEM
A-544	DR. Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	F.P.DEMOKRAT
A-11	TOMMY KURNIAWAN	F.PKB
A-409	RAFLI	F.PKS
A-416	Hj. NEVI ZUAIRINA	F.PKS
A-481	H. NASRIL BAHAR, SE	F.PAN
A-493	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	F.PAN
A-498	PRIMUS YUSTISIO, SE	F.PAN
A-463	ELLY RACHMAT YASIN	F.PPP

#### D. Objek Kunjungan Kerja

Terkait dengan tujuan serta ruang lingkup Kunjungan Kerja Reses tersebut, beberapa pihak yang terlibat antara lain:

1. Beberapa Kementerian/Lembaga terkait antara lain :
  - a. Kementerian Perdagangan
  - b. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
2. Beberapa BUMN (Termasuk Anak Perusahaan BUMN) antara lain :
  - a. PT Angkasa Pura I (Persero)
  - b. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
  - c. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
  - d. PT Wijaya Karya Realty
  - e. PT BRI (Persero) Tbk.
  - f. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
  - g. PT Pertamina (Persero)

## II. INFORMASI KUNJUNGAN KERJA

Pertemuan dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali dibagi menjadi dua sesi. Beberapa informasi yang disampaikan oleh mitra kerja Komisi VI DPR RI pada saat kunjungan kerja reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 ke Provinsi Bali secara terperinci sebagai berikut :

### A. SESI I

Tanggal Pertemuan	15 Februari 2021
Lokasi	The Ballroom, Hotel Inaya Putri Bali Nusa Dua, Bali
Pimpinan Rapat	Gde Sumarjaya Linggih (Pimpinan Komisi VI DPR RI)
Mitra yang Hadir	a. Staf Khusus II Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulingga, beserta jajaran. b. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Bapak Faik Fahmi, beserta jajaran. c. Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Bapak Irfan Setiaputra, beserta jajaran. d. Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natour (Persero), Bapak Iswandi Said, beserta jajaran. e. Direktur Utama PT Wijaya Karya Realty, Bapak Koko Cahyo Kuncoro, beserta jajaran.
Tema	Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pariwisata khususnya di Provinsi Bali termasuk sektor turunannya seperti pengelolaan bandara dan transportasi beserta langkah strategi untuk mengatasinya.

Secara garis besar, pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang sangat berat pada perekonomian Provinsi Bali. Sebelum terjadinya pandemi, tercatat bahwa perekonomian Provinsi Bali bertumpu pada sektor pariwisata atau menyumbang sebesar 53% terhadap perekonomian Bali. Namun demikian,

kebijakan pembatasan mobilisasi warga di masa pandemi dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19 menyebabkan penurunan yang sangat signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Bali baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik.

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali juga berdampak secara langsung pada sektor perhotelan di Bali. Akibat pandemi Covid-19, tingkat hunian hotel-hotel di Bali menurun secara drastis ke angka 7 sampai dengan 8%. Hal tersebut memaksa pihak manajemen hotel untuk melakukan efisiensi operasional secara fundamental dimana salah satu langkahnya dengan melakukan pengurangan jumlah karyawan. Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang sangat berat pada perekonomian Bali dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan ketiga tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -12,28% atau lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam pertemuan, beberapa mitra menyampaikan dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja perusahaan beserta beberapa langkah strateginya, terinci sebagai berikut.

### **PT Angkasa Pura I (Persero)**

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) antara lain:

1. Pandemi Covid 19 berdampak signifikan terhadap penurunan trafik penerbangan global dan diprediksikan akan kembali pulih di tahun 2022-2023. Beberapa penyebab lamanya pemulihan kondisi penerbangan global antara lain :
  - a. Hingga vaksin ditemukan, masih terdapat resiko pandemi Covid-19 gelombang berikutnya yang dapat menghambat kepercayaan penumpang.
  - b. Pertumbuhan penerbangan internasional dinilai lebih lambat karena perlu ada standar prosedur keselamatan yang dapat diterima secara global.
2. Pemulihan penerbangan di Indonesia dapat berlangsung lebih cepat karena didukung oleh pertumbuhan penerbangan domestik.
3. Secara nasional, pertumbuhan trafik penumpang bandara selama 5 tahun terakhir sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2016	85 Juta
2017	90 Juta
2018	97 Juta
2019	82 Juta
2020	31 Juta

Jumlah trafik penumpang di tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 62,19% dibandingkan trafik tahun 2019. Selain itu pendapatan PT Angkasa Pura I (Persero) di tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 54.47% menjadi Rp. 3,93 Triliun dari sebelumnya Rp. 8,632 Triliun di tahun 2019.

4. Khusus untuk trafik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali, beberapa kondisi penurunan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 antara lain sbb:
  - a. Pergerakan penumpang di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 74,18% dibandingkan tahun sebelumnya.
  - b. Pergerakan pesawat mengalami di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 65,45% dibandingkan tahun sebelumnya.
  - c. Pergerakan Kargo di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 63,64% dibandingkan tahun sebelumnya.
  - d. Pada periode Januari 2021, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara hanya sebesar 31 wisatawan atau turun lebih dari 99% dibandingkan Januari 2020 dimana kedatangan wisatawan mancanegara sebesar 588.269.
5. Strategi PT Angkasa Pura I (Persero) dalam menghadapi pandemi Covid-19 antara lain :
  - a. Identifikasi resiko strategis, keuangan, dan operasional yang memiliki impikasi terhadap Covid-19 sebagai *baseline* untuk menyusun strategi dan langkah teknis.
  - b. Membentuk tim *crisis centre* yang membantu manajemen AP I berkoordinasi dan melakukan monitoring terhadap SLA pemenuhan kewajiban PSO serta pencapaian target pada *survival strategy*.
  - c. *Rebound strategy* berupa inisiatif perbaikan antara lain perbaikan proses bisnis, restrukturisasi organisasi, *enterprise architecture*, dan *strategic procurement* serta melakukan inisiatif baru dalam hal persiapan *new normal* dan penguatan bisnis baru.
  - d. Mempersiapkan kondisi keuangan perusahaan dengan beberapa program kerja seperti simulasi *cashflow*, *cost leadership* dan *revenue enhancement*.
6. Dukungan AP I terhadap pariwisata di Bali antara lain dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kampanye *#terbanglagi* dan *Ke(m)Bali* melalui konten di media sosial dengan tujuan untuk menraik minat masyarakat untuk kembali terbang dan berwisata ke Bali.
  - b. Kampanye *#safetravelcampaign* yang merupakan hasil kerjasama antara INACA, PHRI, AP I, AP II, AirAsia Indonesia, dan Pemprov Bali bertujuan untuk meyakinkan kembali masyarakat untuk berwisata kembali ke Bali.
  - c. *Safe Corridor Initiative* merupakan hasil aliansi pengelola bandara yang diprakarsai oleh *Incheon International Airport Corporation* yang bertujuan untuk menjaga keandalan operasional anggotanya melalui penerapan beberapa kriteria kesehatan dan keamanan, serta membantu pemulihan industri penerbangan dengan membangun persepsi positif diantara pengguna jasa bandara.

## PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk antara lain :

1. Akibat pandemi Covid-19, jumlah penumpang Garuda Indonesia pada periode Desember 2020 dari dan menuju Bali sebesar 1 juta penumpang atau turun sebesar 76% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan rata-rata frekuensi penerbangan Garuda Indonesia yang mengalami penurunan hingga -63% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2. Jumlah penumpang domestik Garuda Indonesia pada periode Desember 2020 dari dan menuju Bali sebesar 757.000 penumpang atau turun sebesar 72% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Sementara itu, jumlah penumpang internasional pada Desember 2020 dari dan menuju Bali sebesar 255.000 penumpang atau turun sebesar 84% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3. Untuk dapat bertahan dalam situasi pandemi, Garuda Indonesia menjalankan beberapa langkah strategi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan antara lain:
  - a. Optimalisasi penerbangan Kargo dan Charter.
  - b. Renegotiate *Lease Cost* dan *Financial Relaxation*.
  - c. Pengembangan lini bisnis Kargo “KirimAja”.
  - d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali terbang melalui serangkaian kampanye terbang dengan aman dan nyaman.
  - e. Konsisten dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19.
  - f. Optimalisasi jatingan penerbangan.
4. Garuda Indonesia turut berperan aktif dalam mendukung potensi hasil perikanan di Bali dengan membuka penerbangan khusus kargo rute Denpasar – Hongkong. Hingga awal kuartal 1 tahun 2021, penerbangan kargo Denpasar – Hongkong telah berhasil mengangkut sedikitnya 200 Ton komoditas perikanan unggulan di Bali. Jumlah ini diproyeksikan akan terus bertambah dengan peningkatan *demand direct call* yang turut ditunjang oleh penerbangan langsung ini.
5. Dalam mendukung sektor pariwisata di Bali, beberapa program yang dijalankan oleh Garuda Indonesia antara lain :
  - a. Kerjasama dengan jaringan Marriot Bonvoy Hotel & Resorts Indonesia untuk penawaran harga khusus hotel.
  - b. Penawaran harga *bundling* tiket dan hotel melalui kerjasama dengan 36 hotel bintang 4 dan 5 di Bali.
  - c. Penawaran harga *bundling* tiket dan hotel menginap 7 malam melalui kerjasama dengan hotel bintang 4 di Bali.
  - d. Penawaran harga *bundling* tiket, paket golf dan hotel dengan 3 *golf courses* di Bali.
  - e. Penawaran harga *bundling* tiket, paket *cycling* dan hotel dengan *Bali Road Bike* dan Aerotravel.

## PT Hotel Indonesia Natour (Persero)

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Hotel Indonesia Natour (Persero) yang selanjutnya disingkat HIN antara lain :

1. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, kinerja HIN sangat bergantung pada pertumbuhan industri pariwisata. Kondisi industri pariwisata di Bali mengalami penurunan signifikan akibat pandemi Covid-19 dimana tercatat tingkat hunian hotel rata-rata selama tahun 2020 hanya mencapai 15,62% dari sebelumnya sebesar 59,87% di tahun 2019. Selain itu, jumlah kunjungan turis selama tahun 2020 hanya sebesar 1.050.504 atau turun sebesar 83,26% dibandingkan kunjungan turis di tahun 2019 yang sebesar 6.275.210. Penurunan jumlah wisatawan tersebut khususnya wisatawan mancanegara disebabkan oleh larangan kunjungan terhadap beberapa negara penyumbang wisatawan terbesar di Bali yaitu Australia, China dan India.
2. Secara korporasi, rata-rata tingkat hunian hotel pada tahun 2020 hanya sebesar 27,89% atau terjadi penurunan sebesar 34,63% dibandingkan tahun 2019 yang rata-rata tingkat huniannya sebesar 62,53%.
3. Khusus untuk wilayah Bali, tingkat hunian rata-rata di tahun 2020 hanya sebesar 22,36% atau turun sebesar 49,87% dibandingkan tahun 2019 yang tingkat hunian rata-rata mencapai 72,23%.
4. Akibat penurunan tingkat hunian unit hotel di Bali akibat pandemi Covid-19, per tahun 2020 pendapatan unit hotel di Bali mengalami penurunan hingga sebesar 77,55% dibandingkan dengan pendapatan di tahun 2019.
5. Untuk wilayah Bali, unit hotel Inaya Putri Bali, Grand Inna Bali Beach, Grand Inna Kuta masih menjadi unit yang memberikan persentase pendapatan usaha terbesar bagi Perusahaan.
6. Di tengah penurunan kinerja perusahaan yang signifikan, HIN telah menyusun beberapa langkah strategis baik di bidang operasional maupun bidang keuangan. Di sisi operasional, beberapa langkah HIN antara lain :
  - a. Melakukan sertifikasi CHSE terhadap seluruh unit hotel HIN khususnya wilayah Bali guna meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan hotel-hotel HIN.
  - b. Memprioritaskan strategi promosi dengan *specific target market* yaitu wisatawan domestik.
  - c. Menyusun strategi promosi dengan konsep "*portfolio marketing*" dimana program *marketing* masing-masing hotel terintegrasi satu sama lain, agar performa unit-unit hotel bisa merata.
  - d. Memaksimalkan *loyalty member* melalui berbagai *loyalty program*.
  - e. Melakukan inovasi pada *source of business* yang sudah ada, seperti meningkatkan penjualan makanan dan minuman melalui restoran yang ada di masing-masing hotel.
  - f. Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta instansi lainnya.
  - g. Optimalisasi peran HIN sebagai *hospitality & amenities management* pada Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran.



- h. Mempersiapkan seluruh sumber daya perusahaan guna mendukung realisasi program holding BUMN.
- 7. Selain di sisi operasional, HIN juga melakukan langkah strategi di sisi keuangan antara lain :
  - a. Mengajukan relaksasi pembayaran hutang melalui HIMBARA.
  - b. Mengoptimalkan penerimaan dana hibah pariwisata yang diterima unit-unit hotel HIN yang tertib administrasi dalam hal pembayaran pajak tahun 2019.

### **PT Wijaya Karya Realty**

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Wijaya Karya Realty (selanjutnya disingkat WR) antara lain :

1. WR bekerjasama dengan PT Hotel Indonesia Natour (Persero) akan mengelola hotel-hotel BUMN dimana WR akan ditunjuk sebagai holding. WR bersama PT Hotel Indonesia Natour (Persero) akan menjalankan implementasi inisiatif antara lain *turnaround*, *redevelopment*, dan *flagship* hotel.
2. PT Hotel Indonesia Natour Group atau HIG akan menjadi operator dalam ekosistem holding Hotel BUMN. Selain itu, HIG akan menjalankan skema *parenting* untuk hotel-hotel BUMN lain yang belum masuk dalam konsolidasi tahap awal.
3. Dalam tahap awal, akan ada 22 hotel yang akan tergabung dalam holding Hotel BUMN antara lain :
  - a. Hotel milik HIG sebanyak 11 hotel.
  - b. Hotel milik PT Pegadaian (Persero) sebanyak 9 Hotel.
  - c. Hotel milik PT Patrajasa (anak usaha PT Pertamina) sebanyak 1 hotel.
  - d. Hotel milik PT Aerowisata (anak usaha PT Garuda Indonesia) sebanyak 1 hotel.
4. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan holding BUMN Hotel ini sebagai berikut :
  - a. Tahap I (*Consolidation and Turnaround*), yaitu konsolidasi awal atas 22 hotel dari 4 Group BUMN dan pelaksanaan *turnaround* program. Tujuannya adalah membentuk portfolio hotel BUMN yang *sizeable* dan *profitable* sekaligus implementasi atas *turnaround initiatives*. Target penyelesaian tahap ini adalah bulan Mei 2021.
  - b. Tahap II yaitu *Parenting and Partnership* untuk hotel-hotel yang belum terkonsolidasi. Perkiraan target penyelesaian adalah bulan Desember 2022.
  - c. Tahap III yaitu *Fundraising and Investment* dimana dalam tahap ini holding akan fokus pada ekspansi hotel ke arah bisnis model *asset-light* serta melalui pasar modal. Perkiraan target penyelesaian di tahun 2024.

## B. SESI II

Tanggal Pertemuan	16 Februari 2021
Lokasi	The Ballroom, Hotel Inaya Putri Bali Nusa Dua, Bali
Pimpinan Rapat	Faisol Riza (Ketua Komisi VI DPR RI)
Mitra yang Hadir	a. Staf Khusus II Menteri BUMN, Bapak Arya Sinulingga, beserta jajaran. b. Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar Kementerian Perdagangan, Bapak Sutriyono Edi, beserta jajaran. c. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Bapak Rizal E. Halim, beserta jajaran. d. Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Ibu Nicke Widyawati, beserta jajaran. e. Direktur Kepatuhan PT BRI (Persero) Tbk., Bapak Achmad Solichin Lutfiyanto, beserta jajaran. f. Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Bapak Rohan Hafas, beserta jajaran.
Tema	a. Strategi pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Provinsi Bali termasuk keterjangkauan dan stabilitas harga pada masa Pandemi Covid-19. b. Program perlindungan konsumen di Provinsi Bali. c. Dukungan perbankan terhadap pelaku pariwisata dan perhotelan di Provinsi Bali khususnya untuk segmen <i>small and medium enterprises</i> . d. Realisasi penyaluran dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Bank BUMN di Pulau Bali. e. Kebutuhan energi (BBM dan Gas) di Provinsi Bali serta strategi pemenuhannya di masa Pandemi Covid-19.

Dalam pertemuan, beberapa mitra kerja menyampaikan dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja perusahaan beserta beberapa langkah strateginya, terinci sebagai berikut.

### **Kementerian Perdagangan**

Beberapa hal yang disampaikan oleh Kementerian Perdagangan antara lain :

1. Perdagangan pangan selalu menjadi perhatian Kementerian Perdagangan termasuk ketersediaan dan keterjangkauan di sisi konsumen. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok, Kementerian Perdagangan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari produksi dalam negeri sebagai tulang punggung pasokan nasional.

2. Beberapa langkah pengamanan pasar produk pangan produksi dalam negeri antara lain :
  - a. Penetapan harga acuan pembelian di tingkat petani untuk beberapa komoditas barang kebutuhan pokok.
  - b. Penetapan harga pembelian pemerintah untuk gabah dan beras dalam rangka memberikan jaminan harga dan jaminan pasar bagi hasil produksi petani dalam negeri.
  - c. Pengelolaan cadangan beras pemerintah untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga oleh Perum Bulog.
  - d. Implementasi sistem resi gudang untuk beberapa komoditas pangan seperti beras, jagung, bawang merah, ikan dan daging ayam beku sehingga petani dapat menyimpan hasil produksi saat terjadi *over supply* dan melakukan penjualan saat harga dinilai sudah optimal.
  - e. Pembahasan kebijakan impor pangan dilakukan di bawah koordinasi Menko Perekonomian melalui mekanisme rapat terbatas tingkat menteri agar kebijakan impor dapat dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
3. Kementerian perdagangan terus berupaya untuk meningkatkan ekspor tidak terkecuali untuk produk UMKM dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Pengembangan SDM bidang ekspor melalui *coaching program* yang bertujuan untuk mencetak calon eksportir.
  - b. Memfasilitasi pengembangan produk ekspor dengan pengembangan melalui *Indonesia Design Development Centre* (IDDC) yang merupakan wadah untuk berkolaborasi bagi pelaku usaha, desainer, asosiasi, dan akademisi untuk menciptakan produk berbasis design yang berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing.
  - c. Penyediaan informasi peluang pasar ekspor melalui layanan digital yaitu *InaExport.id* yang merupakan layanan satu atap untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh informasi perdagangan ekspor.
  - d. Memfasilitasi promosi kepada pelaku usaha baik secara offline maupun online antara lain dengan mengadakan *business matching* yang dilaksanakan secara virtual bekerjasama dengan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, Diaspora maupun para *buyer*.
  - e. Kementerian Perdagangan pada tahun 2021 akan mendirikan *Pilot Project Export Centre* di kota Surabaya yang merupakan pengembangan dari *FTA Centre*. *Export Centre* bertujuan untuk mempermudah para pelaku usaha di daerah untuk memperoleh akses informasi perkembangan terkini mengenai peluang ekspor.
4. Dalam rangka membantu pasar rakyat menghadapi Pandemi Covid-19, Kemendag telah melakukan himbauan agar Pasar Rakyat tetap beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan menjalankan protokol kesehatan (sesuai Surat Edaran Menteri Perdagangan) No. 12/2020 tentang

SOP Protokol Kesehatan Untuk Implementasi Pembukaan Aktivitas Perdagangan di Era New Normal. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga mendorong para pedagang dan pengelola pasar rakyat untuk melakukan digitalisasi pasar dengan transaksi secara *online* melalui *platform* media sosial ataupun *marketplace*.

### Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Beberapa hal yang disampaikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) antara lain :

1. Total pengaduan masyarakat di tahun 2020 yang masuk ke BPKN sebanyak 1.372 pengaduan di mana pengaduan yang masih proses sebanyak 537 dan pengaduan yang sudah *closed* sebanyak 835.
2. Secara terperinci, jumlah pengaduan yang ditangani oleh BPKN di Tahun 2020 per sektor terinci dalam tabel sebagai berikut :

Sektor	Jumlah Pengaduan	Proses	Closed
Perumahan	524	268	256
<i>E-Commerce</i>	315	112	203
Jasa Keuangan	225	69	156
Jasa Telekomunikasi	78	41	37
Jasa Transportasi	36	4	32
Barang Elektronik, Telematika dan Kendaraan Bermotor	33	2	31
Listrik dan Gas Rumah Tangga	20	8	12
Obat dan Makanan	6	0	6
Layanan Kesehatan	9	4	5
Lain-lain	126	29	97
Total	1372	537	835

3. Total pengaduan masyarakat yang masuk ke BPKN per 28 Januari 2021 sebanyak 332 pengaduan dimana pengaduan yang masih proses sebanyak 320 pengaduan dan yang sudah *closed* sebanyak 12 kasus.
4. BPKN berkomitmen untuk terus mendorong upaya penguatan edukasi masyarakat dan sosialisasi hak-hak konsumen yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang sekaligus kegiatan advokasi atau pendampingan kepada masyarakat.
5. BPKN telah beberapa kali melakukan sosialisasi dan edukasi di beberapa Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya di Bali antara lain :
  - a. Edukasi perlindungan konsumen di Universitas Udayana.
  - b. Edukasi perlindungan konsumen di Politeknik Negeri Bali.
  - c. Edukasi perlindungan konsumen di Pascasarjana Universitas Ngurah Rai.
  - d. Edukasi perlindungan konsumen di Disperindag Denpasar.
  - e. *Workshop* perlindungan konsumen bersama pemangku kepentingan di Daerah.

- f. Penguatan perlindungan konsumen di Disperindag Provinsi Bali.
  - g. Advokasi perlindungan konsumen di Universitas Warmadewa.
6. Terkait dengan tingginya pemanfaatan ekonomi digital di Indonesia dan global, diperlukan peraturan yang memadai termasuk terkait dengan aliran data dan informasi. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKN menilai pemerintah saat ini perlu mengubah beberapa ketentuan regulasi antara lain :
- a. PP no. 80/2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sudah terbit namun RUU Perlindungan Data Pribadi belum terbit.
  - b. PP No. 4./2019 tentang BPKN.
  - c. Penanganan permasalahan sengketa lintas batas (*Cross Border Issue*).
  - d. Pelaksanaan penarikan produk lintas negara (*Cross Border Product Recall*).
  - e. Pemanfaatan teknologi untuk penyelesaian sengketa konsumen.
  - f. Melindungi konsumen rentan seperti anak-anak, lanjut usia, buta huruf & buta teknologi serta kelompok disabilitas lainnya.

### **PT Pertamina (Persero)**

Beberapa hal yang disampaikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) antara lain :

1. Aktivitas pariwisata merupakan tulang punggung sektor ritel Pertamina Bali. Dengan adanya pandemi Covid-19, sektor ritel mengalami penurunan signifikan dikarenakan aktivitas pariwisata dan daya beli masyarakat yang menurun. Dampak penurunan tersebut terhadap aktivitas Pertamina di Bali antara lain :
  - a. Sektor *Gasoline* (Premium, Peralite, Pertamina, Pertamina Turbo) mengalami penurunan terendah hingga 46% pada bulan April 2020.
  - b. Sektor *Gasoil* (Biosolar, Dexlite, Pertamina Dex) mengalami penurunan terendah hingga 44% pada bulan Mei 2020.
  - c. Sektor LPG (LPG 3kg, LPG Non PSO) mengalami penurunan terendah hingga 17% pada bulan Mei 2020.
  - d. Sektor aviasi mengalami penurunan terendah hingga 96% pada bulan Mei 2020, dan sampai saat ini masih belum pulih karena belum dibukanya penerbangan internasional.
2. Berbagai langkah Pertamina dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Bali khususnya pada masa Pandemi sebagai berikut :
  - a. Tetap menjaga stok di level maksimum.
  - b. Menjaga kualitas layanan dengan mengoperasikan seluruh SPBU dan SPBE.
  - c. Tidak melakukan PHK, baik internal Pertamina maupun Mitra Bisnis Pertamina.
  - d. Pertamina melakukan disiplin penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di seluruh titik operasional infrastruktur dan titik layanan (SPBU, Agen, SPBE).

- e. Untuk mempertahankan kelangsungan usaha kepada Mitra, Pertamina memberikan kredit berjangka waktu dan tambahan margin terbatas waktu tertentu.
  - f. Pertamina melakukan program diskon kepada segmen masyarakat tertentu.
3. Peta sebaran distribusi BBM dan LPG di Provinsi Bali sebagai berikut :

Stasiun/Agen	Jumlah
SPBU (termasuk SPBU Reguler, SPBU Mini, SPBU Kompak, dan SPBU Nelayan)	208
SPBE	18
Retester	12
Agen PSO	92
Agen Non PSO	22
Pangkalan	2.714
Pertashop	11
Desa	716

4. *Roadmap* Pertamina jangka pendek antara lain :
- a. Keterjangkauan energi sampai ke pelosok desa dengan bantuan Pertashop dan *One Village One Outlet* (OVVO).
  - b. Peralihan BBM yang lebih ramah lingkungan dengan Program Langit Biru.
  - c. Mendorong transaksi *cashless* dengan aplikasi MyPertamina.
  - d. Pemasangan PLTS *Rooftop* di SPBU.
5. *Roadmap* Pertamina jangka menengah antara lain :
- a. *EV Bike Rental* (Penyediaan 500 Motor Listrik dan Penyediaan 10 HUB stasiun pengisian atau penukaran *battery*).
  - b. Pemasangan solar panel dan *battery* di rumah tangga.
  - c. Rencana kerjasama Pertamina – ITDC (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) berkapasitas 500 kW dan Floating Solar PV di Kawasan ITDC Nusa Dua Bali.

### **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang selanjutnya disingkat BRI antara lain :

1. Total jaringan BRI di Provinsi Bali terinci sebagai berikut :

Jaringan	Jumlah
Kantor Cabang	13
Kantor Cabang Pembantu (KCP)	16
Kantor Kas	12
BRI Unit	131
Teras BRI	66
Agen Brilink	9.742

2. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 berdampak besar pada beberapa indikator ekonomi di Provinsi Bali antara lain :
  - a. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan ke angka -9,3% di tahun 2020 dari sebelumnya 5,6% di tahun 2019.
  - b. Jumlah pengangguran di tahun 2020 meningkat sebanyak 105.210 orang.
  - c. Jumlah wisatawan asing di tahun 2020 hanya sebesar 1.050.505 atau turun sebesar 83,26%.
3. Kinerja BRI Provinsi Bali terinci sesuai table sebagai berikut :

<b>Indikator</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>%Perubahan</b>
<i>Deposit</i>	Rp. 18.022,7 M	Rp. 18.417,7 M	2.19%
<i>Loan</i>	Rp. 20.565,6 M	Rp. 22.257,1 M	8.23%
<i>NPL</i>	0.8%	0.6%	-0.2%
<i>LDR</i>	114.1%	120.8%	6.7%

4. Total dana BPUM yang disalurkan oleh BRI Bali sebesar Rp. 520,58 Miliar dimana sebesar Rp. 410,41 Miliar telah cair dan sisanya sebesar 110,17 Miliar belum cair.
5. Total restrukturisasi kredit yang telah dilakukan oleh BRI Bali terhadap nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 adalah sebesar Rp. 10,25 Triliun. Restrukturisasi ini dilakukan mengingat mayoritas nasabah di Provinsi Bali sangat terdampak pandemi Covid-19 mengingat sektor utama di provinsi Bali adalah sektor pariwisata.
6. Dukungan BRI dalam pemulihan sektor UMKM di Provinsi Bali antara lain dengan melaksanakan beberapa program sebagai berikut :
  - a. *Business Gathering* BRI bersama Petani Manggis dalam hal sosialisasi perihal edukasi simpanan, pinjaman dan produk lainnya (literasi keuangan).
  - b. Pendampingan kepada para pelaku UMKM dengan memberikan pelatihan serta program CSR BRI Peduli yang didukung dengan pemberian kredit oleh BRI.
  - c. BRI melalui Rumah Kreatif BUMN (RKB) mengajak masyarakat untuk meningkatkan kreativitas dengan menjadi anggota RKB dimana kegiatan di RKB meliputi pelatihan, pendampingan dan pameran yang difasilitasi oleh BRI secara gratis.
  - d. Sosialisasi dan pendampingan kepada Petani cacao dan Koperasi Eksportir Cacao.

#### **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

Beberapa hal yang disampaikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang selanjutnya disebut Bank Mandiri antara lain :

1. Perkembangan kinerja Bank Mandiri Provinsi Bali di tahun 2020 sebagai berikut :
  - a. Kredit per Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 5,6 Triliun atau tumbuh sebesar 2,39% dibandingkan tahun 2019 (*year on year*).

- b. Dan Pihak Ketiga (DPK) per Desember 2020 tercatat sebesar Rp. 11,4 Triliun atau tumbuh negatif sebesar -8,05% dibandingkan tahun 2019 (*year on year*).
  - c. NPL tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,82% dibandingkan tahun sebelumnya.
  - d. *Market share* kredit mengalami peningkatan sebesar menjadi 7,17% di tahun 2010 dibandingkan periode sebelumnya yang hanya sebesar 6,98%. Namun di sisi lain, *market share* dana pihak ketiga mengalami penurunan menjadi 10,62% di tahun 2010 dari sebelumnya sebesar 11,25% di tahun 2019.
2. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat oleh Bank Mandiri region XI (Bali dan Nusa Tenggara) sebesar Rp. 1,53 Triliun dengan jumlah debitur mencapai 13.930 debitur.
  3. Bank Mandiri Region XI telah melakukan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 kepada 24.725 debitur dengan nominal kredit mencapai Rp. 4,66 Triliun. Sesuai POJK 11/2020 cara restrukturisasi tersebut meliputi :
    - a. Perpanjangan jangka waktu
    - b. Pengurangan tunggakan bunga.
  4. Bank Mandri Region XI telah menyalurkan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada 11.550 debitur dengan nominal mencapai Rp. 2,05 Triliun.
  5. Dukungan yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap sektor pariwisata di Bali antara lain :
    - a. Digitalisasi kawasan wisata berbasis QRIS dan platform pembayaran digital di Daerah Tujuan Wisata (DTW) Pantai Pandawa, *Water Blow* ITDC Nusa Dua, dan *Monkey Forest* Ubud.
    - b. Mendukung acara lokal dalam Bali Revival 2020 Ubud.
    - c. Mendukung penggunaan kartu e-Money melalui pembayaran parkir kendaraan di kawasan wisata, mall, pasar dan bandara Ngurah Rai.

### III. CATATAN DAN REKOMENDASI

Dari pertemuan yang dilakukan kepada seluruh mitra pada saat pelaksanaan kunjungan kerja reses ini, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian mitra (Kementerian/Lembaga) atau BUMN yang diundang dalam pertemuan. Catatan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

#### A. PT Angkasa Pura I (Persero)

1. Diharapkan PT Angkasa Pura I (Persero) berkolaborasi dengan BUMN lainnya di sektor pariwisata untuk lebih fokus pada pengembangan sektor pariwisata yang berorientasi pada target wisatawan dalam negeri mengingat diprediksikan sektor pariwisata internasional akan lebih lama pulih dari kondisi pandemi Covid-19.



2. PT Angkasa Pura I (Persero) diharapkan melakukan kajian dan mempertimbangkan dalam penerapan *transit charge* untuk penumpang transit internasional dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan.
3. Terkait dengan pengelolaan serta perluasan bandara, diharapkan agar masyarakat setempat (pelaku UMKM) lebih terlibat sehingga keberadaan bandara mampu memberikan nilai lebih pada peningkatan ekonomi lokal.
4. PT Angkasa Pura I (Persero) diharapkan mampu memberikan kebijakan khusus bagi pelaku UMKM yang sementara berhenti melakukan kegiatan di Bandara berupa pemutihan tunggakan biaya sewa mengingat pelaku UMKM tersebut sangat terdampak Pandemi Covid-19.
5. Dalam penyusunan dan pelaksanaan *roadmap* perusahaan, diharapkan PT Angkasa Pura I (Persero) tetap memperhatikan dan mengedepankan aspek *sustainable development*.
6. PT Angkasa Pura I (Persero) khususnya pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali diharapkan melakukan langkah-langkah strategi dalam rangkaantisipasi lonjakan penumpang pada saat sektor pariwisata *rebound* akibat berakhirnya pandemi Covid-19.

**B. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.**

1. Diharapkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. lebih fokus dalam menangkap peluang bisnis kargo yang dinilai masih potensial di masa pandemi Covid-19.
2. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi program-program kerja, salah satunya program dengan Kementerian Pariwisata melalui *channel* yang dimiliki misalnya sosial media serta penempatan brosur pada kantung-kantung masker/*handsanitizer* yang diberikan kepada penumpang selama penerbangan.
3. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. diharapkan lebih berhati-hati dalam penanganan perjanjian internasional misalnya perjanjian sewa pesawat sehingga tidak merugikan secara korporasi serta menghindari resiko reputasi di dunia internasional.
4. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. diharapkan mempertimbangkan pembukaan rute penerbangan dari dan ke Bandara Silangit dalam rangka mendukung program destinasi wisata nasional super prioritas.
5. Berkolaborasi dengan BUMN lainnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. diharapkan lebih fokus pada pengembangan sektor pariwisata yang berorientasi pada target wisatawan dalam negeri mengingat diprediksikan sektor pariwisata internasional akan lebih lama pulih dari kondisi pandemi Covid-19.
6. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diharapkan melakukan analisa atas jumlah dan jenis pesawat yang dimiliki serta proyeksi kebutuhan kedepannya, sehingga pemenuhan kebutuhan pesawat dapat dilakukan lebih efisien untuk mengurangi biaya *maintenance* dll.

### **C. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)**

1. PT Hotel Indonesia Natour (Persero) diharapkan mampu memberikan perhatian kepada seluruh unit hotel yang dimiliki (tidak hanya di Bali), beberapa diantaranya adalah Hotel Inna Parapat, Grand Inna Malioboro dll., khususnya dalam hal perbaikan dan *improvement* sehingga mampu memaksimalkan potensi pariwisata yang dimiliki.
2. PT Hotel Indonesia Natour (Persero) diharapkan mampu meningkatkan kinerja, pelayanan serta inovasi sehingga menjadi brand terkemuka (Hotel Indonesia) sebagai pengelola hotel nasional yang dimiliki oleh Indonesia (tuan rumah di negeri sendiri).
3. PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dinilai penting untuk melaksanakan pertukaran Sumber Daya Manusia antar unit hotel yang dimiliki dalam rangka peningkatan standard layanan dimana pengelolaan Hotel Inaya Putri Bali dapat dijadikan *benchmark* untuk unit hotel yang lain.
4. PT Hotel Indonesia Natour (Persero) diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan ekonomi lokal serta mampu memasukkan unsur-unsur tradisional ke dalam pengelolaan hotel seperti menyediakan makanan tradisional dalam menu makanan yang ditawarkan.

### **D. PT Wijaya Karya Realty**

1. Diharapkan pembentukan holding hotel BUMN mampu memberikan nilai tambah bagi pengelolaan hotel BUMN dan mendorong peningkatan kinerja hotel BUMN secara terintegrasi.
2. PT Wika Realty dan PT Hotel Indonesia Natour Group diharapkan mampu bersinergi dalam pengelolaan holding hotel BUMN sehingga mampu memberikan kontribusi pada perekonomian nasional.

### **E. Kementerian Perdagangan**

1. Kementerian Perdagangan diminta untuk melakukan langkah strategi dalam rangka melindungi produsen dan pelaku usaha dalam negeri dari tekanan komoditas impor yang semakin banyak di Indonesia.
2. Kementerian Perdagangan diminta untuk melakukan upaya dalam rangka menjaga stabilitas harga komoditas baik di tingkat konsumen maupun tingkat produsen.
3. Kementerian Perdagangan diharapkan mampu mengoptimisasi fungsi dan kinerja *Indonesia Trade Promotion Centre* (ITPC) yang berlokasi di beberapa negara dalam rangka meningkatkan peluang ekspor bagi pelaku usaha nasional.
4. Kementerian Perdagangan diharapkan melakukan langkah strategi terkait perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara lain atau CEPA sehingga para pelaku usaha di dalam negeri mampu memanfaatkan keberadaan CEPA tersebut.

**F. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)**

1. BPKN diharapkan meningkatkan kekuatan secara internal (peningkatan kapasitas dan perbaikan tata kelola tim) agar mampu menjalankan fungsinya terkait perlindungan konsumen di Indonesia.
2. BPKN diharapkan meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan hak-hak konsumen serta agar masyarakat lebih mengenal BPKN sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.

**G. PT Pertamina (Persero)**

1. PT Pertamina (Persero) diharapkan mampu berfikir jauh kedepan terkait dengan konsep *renewable energy* dimana Bali dapat dijadikan sebagai percontohan terkait konversi energi ke arah *renewable energy*.
2. Terkait dengan proyeksi peningkatan penggunaan kendaraan berbasis energi listrik serta penggunaan sumber *renewable energy* lainnya, Pertamina diharapkan mampu mengambil peranan yang penting dalam ekosistem baru tersebut serta memikirkan bagaimana kondisi SPBU/SPBE eksisting yang ada saat ini kedepannya di saat penggunaan energi listrik dan *sumber renewable energy* lainnya meningkat.
3. Pertamina diminta meningkatkan cakupan area pelayanan sampai di pelosok daerah di Indonesia untuk mengantisipasi kelangkaan energi (BBM, LPG dll) di pelosok daerah.
4. Pertamina diharapkan untuk selalu meningkatkan upaya digitalisasi SPBU di seluruh wilayah di Indonesia.

**H. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**

1. BRI dan Bank Mandiri diharapkan dalam proses pemberian kredit juga dilakukan pembinaan dan pengelolaan untuk para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan *financial literacy*.
2. Terkait dengan program restrukturisasi kredit yang telah diberikan selama pandemi Covid-19, diharapkan agar BRI dan Bank Mandiri melakukan analisa secara komprehensif mana debitur yang bisa diselamatkan dan mana yang tidak bisa diselamatkan sebagai bagian dari manajemen resiko perbankan.
3. Diharapkan penyaluran BPUM di Bali dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat sasaran.
4. Dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang menyebabkan banyak masyarakat yang beralih ke sektor pertanian, diharapkan BRI dan Bank Mandiri mampu meningkatkan penetrasi dan layanan di sektor pertanian.
5. Diharapkan BRI dan Bank Mandiri mampu melakukan strategi di masa pandemi Covid-19 untuk menjaga tingkat NPL dengan melakukan efisiensi misalnya efisiensi dalam pemberian bonus untuk manajemen dan karyawan serta langkah-langkah efisiensi lainnya.

**Keterangan :**

1. Secara umum, terkait dengan kinerja dan kontribusi BUMN di masa pandemi Covid-19, seluruh BUMN didorong untuk melakukan efisiensi, inovasi dan kreativitas untuk dapat bertahan di situasi pandemi Covid-19.
2. Catatan dan rekomendasi tersebut di atas akan menjadi bahan pertimbangan untuk disampaikan pada rapat kerja dengan Kementerian/Lembaga terkait yang menjadi mitra Komisi VI DPR RI.

**IV. PENUTUP**

Demikian laporan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali pada masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VI DPR RI.

Jakarta, 01 Februari 2021  
Ketua Tim Kunker Komisi VI DPR RI  
Ke Provinsi Bali

**TTD.**

**FAISOL RIZA**

A-33

**LAMPIRAN  
DOKUMENTASI KEGIATAN**



Tim Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali Beserta Mitra Kerja



Pemaparan Mitra Kerja (Kementerian BUMN) Pada Saat Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Bali



Sesi Tanya Jawab Oleh Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Masa  
Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali



Sesi Tanya Jawab Oleh Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Masa  
Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 ke Provinsi Bali